



Kemenkeu Siapkan Regulasi Pacu Akuntabilitas

Para kepala daerah harus disiplin mengelola anggaran secara akuntabel untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan sesuai semangat desentralisasi. Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi yang dapat memacu akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan hal ini dalam peluncuran buku berjudul *Dinamika Regional Era Desentralisasi Indonesia* di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), di Jakarta, Senin (9/6). Buku yang diterbitkan Institut Kajian Asia Tenggara, Singapura, menyoroti pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sejak tahun 1998. "Saat ini 30 persen dari APBN ditransfer ke pemerintah daerah dan mulai tahun 2015 bertambah lagi sesuai amanat Undang-Undang Desa. Ini tantangan baru bagi pemerintahan baru karena tidak mudah mengawasi tata kelola anggaran di daerah, terutama dengan alokasi anggaran baru ke 73.000 desa," kata Chatib. Per Desember 2013, Indonesia memiliki 539 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota selain kota administratif di DKI Jakarta. Dari APBN sebesar Rp 1.800 triliun, sebanyak Rp 600 triliun mengalir ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. (HAM)